

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi pendapatan merupakan pilar fundamental dalam arsitektur ekonomi makro yang menentukan keberlanjutan pembangunan jangka panjang suatu bangsa. Dalam diskursus ekonomi pembangunan kontemporer, konsep distribusi pendapatan telah berevolusi dari sekadar indikator statistik menjadi proksi utama bagi keadilan sosial, stabilitas politik, dan kualitas pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2015; Ray, 1998). Distribusi pendapatan merefleksikan bagaimana kue pembangunan nasional dibagi di antara individu atau rumah tangga, yang secara langsung berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika distribusi ini berjalan secara adil, ia menjadi katalisator bagi mobilitas sosial dan partisipasi ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, ketika distribusi pendapatan terkonsentrasi pada segelintir elit (fenomena yang dikenal sebagai ketimpangan pendapatan) hal ini memicu serangkaian patologi ekonomi, mulai dari inefisiensi alokasi sumber daya, jebakan kemiskinan (*poverty trap*), hingga volatilitas sosial yang dapat meruntuhkan fondasi demokrasi dan institusi pasar (Stiglitz, 2012; Acemoglu & Robinson, 2012).

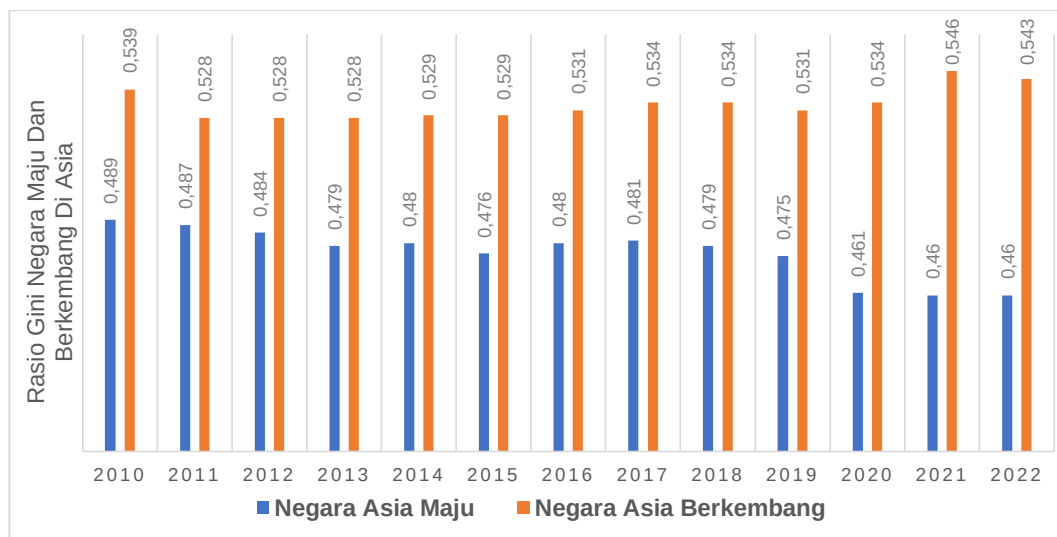
Asia, sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global abad ke-21, menyajikan paradoks pembangunan yang paling mencolok dalam sejarah modern. Kawasan ini telah berhasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan ekstrem melalui transformasi struktural yang agresif, industrialisasi, dan integrasi ke dalam rantai nilai global (*Global Value Chains*). Namun, narasi kesuksesan ini dibayangi oleh realitas ketimpangan yang semakin melebar dan

persisten. Meskipun *The Asian Miracle* telah menciptakan kekayaan agregat yang masif, mekanisme distribusi kekayaan tersebut sering kali gagal menjangkau lapisan terbawah piramida sosial secara proporsional (World Bank, 1993). Fenomena ini menciptakan "Paradoks Pertumbuhan Asia," di mana akselerasi Produk Domestik Bruto (PDB) berjalan beriringan dengan stagnasi atau bahkan pemburukan dalam distribusi pendapatan relatif. Laporan dari Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Asian Development Bank secara konsisten menjelaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang radikal, Asia berisiko terjebak dalam ketimpangan struktural yang akan menghambat transisi menuju status negara berpendapatan tinggi yang inklusif (ADB, 2014; UNDP, 2022).

Urgensi untuk meneliti dinamika ini semakin memuncak pasca-krisis global dan pandemi COVID-19, yang telah mengekspos kerentanan sistemik dalam struktur ekonomi negara-negara Asia. Ketimpangan pendapatan tidak lagi hanya dipandang sebagai residu dari proses pertumbuhan, melainkan sebagai hambatan aktif bagi pertumbuhan itu sendiri (Ostry dkk, 2014). Todaro dan Smith (2011) menegaskan bahwa karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) jauh lebih menentukan standar hidup manusia daripada sekadar angka pertumbuhan agregat, terlepas dari apakah ia bersifat inklusif atau eksklusif. Di Asia, divergensi karakter pertumbuhan ini terlihat sangat tajam antara negara-negara yang telah mencapai kematangan institusional dengan negara-negara yang masih bergelut dengan volatilitas ekonomi dan kerentanan struktural. Oleh karena itu, analisis yang membedah determinan ketimpangan menjadi sangat krusial untuk memetakan jalan keluar dari jebakan ketimpangan

ini, khususnya terkait Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment (FDI), dan Perdagangan Internasional (*Trade*).

Penelitian ini mengambil pendekatan komparatif yang komprehensif dengan membedah dua klaster ekonomi yang berbeda secara fundamental yaitu sembilan negara maju dan sepuluh negara berkembang. Pemilihan kesembilan belas negara ini bukan didasarkan pada pemilihan acak, melainkan dirancang untuk menangkap spektrum penuh dari heterogenitas ekonomi Asia yang kompleks. Alasan pemilihan sampel ini didasarkan pada argumentasi "Divergensi Struktural dan Volatilitas" yang menjadi inti permasalahan ketimpangan di kawasan ini.



Sumber: *World Inequality Database* (data diolah)

Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Sembilan Negara Maju dan Sepuluh Negara Berkembang di Asia

Berdasarkan gambar 1.1 pemilihan sembilan negara maju ini dikarenakan masih memiliki ketimpangan yang relatif sedang ke tinggi dibuktikan pada gambar 1.1 yang dimana negara maju Asia rata-rata rasio gini terendah di tahun 2021 sampai 2022 yaitu 0,46 dan rata-rata rasio gini tertinggi di tahun 2010 memiliki ketimpangan 0,48. Sedangkan pemilihan sepuluh negara berkembang

Asia ini memiliki tingkat ketimpangan yang tertinggi dibandingkan negara berkembang Asia lainnya. Pada negara berkembang di Asia tingkat ketimpangan terendah di 2011 hingga 2013 dengan rata-rata rasio gini 0,52 dan yang tertinggi di tahun 2021 memiliki rata-rata rasio gini 0,54. Maka dari itu nilai indeks gini pada beberapa negara Asia cenderung mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat juga berdasarkan grafik, jika terjadi penurunan ketimpangan, penurunan tersebut hanya dalam angka yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwasanya sangat diperlukan usaha dan upaya dari pemerintah khususnya negara-negara Asia dalam pengurangan angka ketimpangan yang ada pada masyarakat.

Kelompok sembilan negara maju merepresentasikan *Production Possibility Frontier* dan stabilitas ekonomi di Asia. Negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan adalah representasi dari keberhasilan industrialisasi dan transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Israel, dan Uni Emirat Arab merepresentasikan model ekonomi berbasis sumber daya yang sedang bertransisi menuju diversifikasi dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Hongkong melengkapi kelompok ini sebagai representasi ekonomi maju dengan orientasi teknologi dan jasa keuangan yang kuat. Secara statistik, kelompok ini memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dengan rata-rata pertumbuhan 1,397% dan standar deviasi 3,715 selama periode pengamatan 2010-2022. Lebih penting lagi, kelompok ini memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah dan terkendali, dengan rata-rata rasio Gini 0,477. Pemilihan kelompok ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana stabilitas makroekonomi, kematangan institusi, dan

kapasitas fiskal yang kuat mampu memitigasi dampak buruk dari guncangan eksternal terhadap distribusi pendapatan.

Kelompok sepuluh negara berkembang merepresentasikan wajah lain dari Asia yang penuh dengan dinamika, kerentanan, dan volatilitas ekstrem. Negara-negara seperti India, Indonesia, Thailand, dan Kamboja mewakili ekonomi pasar berkembang (*emerging markets*) yang sedang mengalami transformasi industrialisasi cepat namun masih dihadapkan pada dualisme pasar tenaga kerja dan sektor informal yang besar. Di sisi lain, inklusi negara-negara yang terdampak konflik atau sanksi geopolitik seperti Iran, Irak, Suriah, Yaman, Bahrain, dan Myanmar memberikan dimensi analisis yang sangat kritis mengenai bagaimana ketidakstabilan politik dan kehancuran infrastruktur memperburuk ketimpangan. Secara statistik, kelompok negara berkembang ini menunjukkan tingkat volatilitas yang mengkhawatirkan dengan standar deviasi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,233 dan kontraksi ekonomi ekstrem hingga -29,922% pada masa krisis. Ketimpangan di kelompok ini jauh lebih akut, dengan rata-rata rasio Gini 0,529 dan batas bawah ketimpangan yang masih sangat tinggi (0,429) dibandingkan negara maju.

Justifikasi kuat di balik penggabungan kedua kelompok ekstrem ini dalam satu kerangka analisis adalah untuk menguji hipotesis konvergensi dan efektivitas mekanisme transmisi ekonomi. Dengan membandingkan negara yang memiliki institusi redistribusi matang (negara maju) dengan negara yang memiliki institusi rentan (negara berkembang), penelitian ini dapat mengisolasi dampak murni dari variabel makroekonomi (Pertumbuhan, FDI, Perdagangan Internasional) terhadap ketimpangan. Apakah pertumbuhan ekonomi di negara yang stabil (seperti Jepang) memiliki dampak yang sama terhadap penurunan

ketimpangan dibandingkan dengan pertumbuhan di negara yang volatil (seperti India atau Yaman)? Data deskriptif awal menunjukkan adanya divergensi struktural yang nyata. Negara maju mampu menjaga stabilitas aliran modal dan perdagangan internasional yang masif (rata-rata FDI 4,394 dan perdagangan internasional 4,721), sementara negara berkembang menghadapi keterbatasan akses pasar dan volatilitas arus modal (rata-rata FDI 2,556 dan perdagangan internasional 4,181). Perbedaan kapasitas struktural inilah yang diduga menjadi penyebab utama mengapa mekanisme *trickle-down effect* sering kali macet di negara berkembang, menyebabkan ketimpangan yang persisten dan akut.

Pertumbuhan ekonomi, sebagai variabel independen pertama, memiliki hubungan teoritis yang kompleks dengan ketimpangan. Hipotesis Kurva Kuznets klasik menyatakan hubungan terbalik-U, di mana ketimpangan akan naik pada tahap awal pembangunan dan turun pada tahap lanjut (Kuznets, 1955). Namun, realitas di Asia sering kali menantang hipotesis ini. Di negara-negara berkembang sampel seperti Indonesia dan India, pertumbuhan tinggi sering kali didorong oleh sektor padat modal atau teknologi yang bias keterampilan (*skill-biased*), yang justru meningkatkan premium upah bagi tenaga kerja terampil dan meninggalkan tenaga kerja tidak terampil, sehingga memperlebar jurang ketimpangan. Sebaliknya, di negara maju Asia, pertumbuhan ekonomi yang lebih moderat namun stabil sering kali disertai dengan kebijakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga mampu menurunkan ketimpangan. Ketika ekonomi negara berkembang berkontraksi tajam (seperti kasus Yaman atau saat pandemi), kelompok miskin adalah yang paling terdampak karena hilangnya pendapatan sektor informal, sementara kelompok kaya memiliki aset pelindung, sehingga memperparah ketimpangan (Acemoglu, 2002).

Foreign Direct Investment (FDI), sering digadang-gadang sebagai kunci bagi pembangunan melalui transfer modal dan teknologi. Teori Modernisasi memprediksi bahwa FDI akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan upah, sehingga menurunkan ketimpangan (Romer, 1993; Solow, 1956). Namun, Teori Dependensi dan *World Systems Theory* berargumen sebaliknya, bahwa FDI dapat menciptakan dualisme ekonomi dan memperburuk ketimpangan dengan menguntungkan elit lokal dan pemilik modal asing (Bornschier & Chase-Dunn, 1985; Prebisch, 1950). Dalam konteks sampel penelitian ini, perbedaan dampak FDI sangat terasa. Negara maju seperti Singapura mampu menarik FDI berkualitas tinggi (rata-rata 23,80%) yang terintegrasi dengan ekosistem inovasi domestik, menciptakan lapangan kerja bergaji tinggi bagi kelas menengah luas. Sebaliknya, di negara berkembang, FDI sering kali terkonsentrasi pada sektor ekstraktif atau manufaktur enklave yang memiliki keterkaitan lemah (*low backward linkages*) dengan ekonomi lokal, atau masuk ke negara dengan modal manusia rendah sehingga manfaatnya tidak tersebar merata. Meskipun secara teori FDI membantu menurunkan ketimpangan secara umum, literatur terbaru seperti Yuldashev et al. (2023) dan Le et al. (2021) menekankan bahwa efek positif ini sangat kondisional pada tingkat pendidikan dan stabilitas institusi, dimana hal ini adalah faktor-faktor yang justru menjadi titik lemah di sepuluh negara berkembang sampel.

Perdagangan Internasional (*Trade*), menjadi elemen paling dinamis namun juga paling ambigu dampaknya. Teori Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) memprediksi bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan faktor produksi yang melimpah (tenaga kerja di negara berkembang), sehingga menurunkan ketimpangan (Ohlin, 1933; Stolper & Samuelson, 1941). Ekspor

manufaktur dari negara berkembang seperti Vietnam atau Kamboja memang menciptakan lapangan kerja (menurunkan ketimpangan). Namun di sisi lain, impor teknologi dan barang modal ke negara-negara ini meningkatkan permintaan tenaga kerja terampil dan menggantikan tugas-tugas rutin, yang memperlebar ketimpangan upah. Selain itu, bagi negara maju, perdagangan internasional intra-industri yang dominan mungkin tidak banyak mengubah struktur distribusi pendapatan domestik karena jaring pengaman sosial yang sudah mapan. Literatur dari Lin (2025) dan Koh et al. (2022) mendukung pandangan bahwa dampak perdagangan internasional terhadap ketimpangan semakin tidak konklusif di era rantai nilai global yang kompleks, di mana keuntungan perdagangan internasional tidak selalu mengalir ke pekerja.

Selain ketiga variabel utama tersebut, penelitian ini juga memasukkan analisis mengenai persistensi ketimpangan. Ada indikasi adanya "jebakan ketimpangan" (*inequality trap*), terutama di negara-negara berkembang yang memiliki mobilitas sosial rendah dan akses pendidikan yang tidak merata (Bourguignon, 2004; Piketty, 2014). Cizek (2016) menekankan pentingnya model dinamis ini untuk menangkap inersia distribusi pendapatan yang sering kali diabaikan dalam analisis statis. Selain itu juga ada faktor fundamental di luar variabel makroekonomi, seperti kualitas institusi, stabilitas politik, dan kebijakan redistribusi, yang membuat negara maju memiliki ketimpangan yang secara struktural lebih rendah dibandingkan negara berkembang.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas adanya urgensi untuk melakukan analisis mendalam yang tidak hanya melihat hubungan linear, tetapi juga memahami konteks struktural yang membedakan negara maju dan berkembang di Asia. Kesenjangan literatur (*research gap*) terlihat dari masih

minimnya studi yang secara spesifik membandingkan klaster negara "ultra-stabil" dengan negara "ultra-volatil" (termasuk negara konflik) di Asia dalam satu model dinamis pasca-2010. Kebanyakan studi terdahulu fokus pada satu negara atau satu kawasan homogen (misalnya hanya ASEAN atau hanya Asia Timur), sehingga gagal menangkap dinamika divergensi Asia yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan metode *System Generalized Method of Moments* (GMM) yang tangguh terhadap masalah endogenitas dan autokorelasi, memberikan bukti empiris baru mengenai determinan ketimpangan di kawasan paling dinamis di dunia ini.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul "Analisis Perbandingan Ketimpangan Pendapatan Negara Maju dan Berkembang di Asia" bertujuan untuk memberikan diagnosis komprehensif mengenai ketimpangan di Asia, dengan harapan dapat merumuskan implikasi kebijakan yang presisi bagi kedua kelompok negara dalam mengejar pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga adil dan inklusif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) terhadap ketimpangan pendapatan di negara maju dan berkembang di kawasan Asia?
2. Bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap ketimpangan pendapatan di negara maju dan berkembang di kawasan Asia?
3. Bagaimana pengaruh Perdagangan Internasional (*Trade*) terhadap ketimpangan pendapatan di negara maju dan berkembang di kawasan Asia?

4. Apakah terdapat perbedaan struktural yang signifikan dalam tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok negara maju dan berkembang di Asia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh dan signifikansi Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di negara maju dan berkembang di Asia.
2. Mengevaluasi dampak aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap distribusi pendapatan di negara maju dan berkembang di Asia.
3. Menguji pengaruh Perdagangan Internasional terhadap ketimpangan pendapatan di negara maju dan berkembang di Asia.
4. Mengidentifikasi perbedaan struktural tingkat ketimpangan antara negara maju dan berkembang di Asia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan, khususnya mengenai determinan ketimpangan pendapatan di kawasan Asia. Penggunaan metode *System GMM* memberikan kontribusi metodologis dalam menangani masalah endogenitas dan dinamika persistensi yang sering diabaikan dalam studi statis.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk menguji relevansi teori-teori klasik seperti Kurva Kuznets, Teori Modernisasi, dan Teori Heckscher-Ohlin dalam konteks ekonomi Asia kontemporer yang heterogen, mulai dari negara pasca-konflik hingga ekonomi maju berbasis teknologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah). Memberikan landasan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pemerintah di negara berkembang Asia untuk merancang strategi pertumbuhan yang lebih inklusif. Temuan mengenai dampak volatilitas pertumbuhan dan peran FDI menyarankan perlunya kebijakan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan agregat, tetapi juga fokus pada stabilitas makroekonomi dan peningkatan kualitas modal manusia untuk menyerap manfaat investasi asing.
- b. Bagi Lembaga Internasional dan Donor. Memberikan wawasan mengenai perlunya pendekatan yang berbeda (*differentiated approach*) dalam memberikan bantuan atau rekomendasi kebijakan struktural bagi negara maju dan berkembang, mengingat adanya perbedaan karakteristik fundamental dalam merespons keterbukaan ekonomi.
- c. Bagi Investor dan Sektor Swasta. Memberikan gambaran mengenai lanskap stabilitas sosial dan ekonomi di negara-negara Asia, yang dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan investasi jangka panjang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial (*ESG investing*).